



CAHYO WIBOWO ST, KETUA FRAKSI PKS Soroti PBG, Regulasi Harus Pertimbangkan Keberpihakan



terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Yogya ini menyoroti bagaimana beberapa perda, alih-alih memberikan kemudahan, justru menciptakan kerumitan dan beban baru bagi warga. Menurutnya, niat awal PBG untuk memastikan standar keamanan dan tata ruang yang baik patut diapresiasi. Namun, dalam implementasinya di lapangan, PBG justru menuai banyak keluhan dari masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.

"Semangat dasar dari undang-undang dan perda turunannya adalah untuk kebaikan masyarakat. Namun, dalam kasus PBG, kita melihat bagaimana birokrasi dan persyaratan yang kompleks justru menjadi tembok penghalang bagi

YOGYA (KR) - Dibentuknya regulasi dinilai harus mempertimbangkan asas keberpihakan terhadap masyarakat kecil. Terutama keberadaan perda sebagai turunan undang-undang. Salah satu yang menjadi sorotan anggota DPRD Kota Yogya Cahyo Wibowo ialah

masyarakat yang ingin membangun atau merenovasi rumahnya," ujar Cahyo Wibowo.

Cahyo Wibowo yang duduk di Komisi C ini menjelaskan, banyak masyarakat kecil yang kesulitan memenuhi berbagai persyaratan administrasi dan teknis yang diatur dalam PBG. "Mulai dari proses pengajuan yang berbelit, biaya yang tidak sedikit, hingga keterbatasan akses informasi, semua ini menjadi PR besar yang harus segera kita benahi. Jangan sampai PBG yang seharusnya melindungi, malah menjadi beban baru yang menyulitkan rakyat," tambahnya.

Kesulitan yang dialami masyarakat karena prosesnya yang panjang dan rumit. Misalnya proses PBG yang diawali dengan pengurusan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Kemudian ketika telah selesai maka ditindaklanjuti dengan persyaratan gambar teknis. Kondisi ini seolah menjadi ladang baru yang menguntungkan pihak tertentu. Serta menyulitkan masyarakat menengah ke bawah serta pengusaha kecil dengan modal minim untuk mendirikan sebuah bangunan.

Dirinya pun menegaskan pengawasan terhadap pembuatan dan implementasi perda turunan undang-undang harus terus diperkuat.

Ia mendesak Pemkot untuk lebih sensitif terhadap kondisi riil di lapangan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perda-perda yang ada.

(Dhi)-f

KR-Ardhi Wahdan

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005